

EVALUASI PEMBERIAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KELURAHAN LEDOK WETAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

Anton Simbolon

antonsimb@gmail.com

Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

ABSTRACT

The condolence program is given to poor people who face difficulties when they want to take care of everything related to the funeral procession of their family members. This death compensation program is a form of concern from the Bojonegoro Regency government to ease the burden on the bereaved family. This study aims to examine and analyze the evaluation of the implementation of the condolence program policy for the poor in Ledok Wetan Village, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency. This study uses a descriptive research type with a qualitative approach. The focus of this study is the evaluation of the implementation of the condolence program policy for the poor with dimensions of (1) effectiveness, (2) efficiency, (3) adequacy, (4) equity, (5) responsiveness and (6) accuracy. The results of this study indicate that this condolence program has been running in accordance with the Regent's regulations and has been running optimally, in accordance with the six dimensions.

Keywords: policy evaluation, condolence compensation

ABSTRAK

Program santunan duka diberikan kepada warga miskin yang menghadapi kesulitan ketika hendak mengurus segala hal berkaitan dengan prosesi pemakaman anggota keluarganya. Program santunan kematian ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi pelaksanaan kebijakan program santunan duka bagi masyarakat miskin di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan program santunan duka bagi masyarakat miskin dengan dimensi (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) pemerataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program santunan duka ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan Bupati dan sudah berjalan secara optimal, sesuai dengan keenam dimensi.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, santunan duka

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara-negara berkembang yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik para akademisi maupun para praktisi. Pada saat ini fakir miskin merupakan masalah utama setiap Negara termasuk Indonesia, yang penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif dan berkesimbangan. Permasalahan fakir miskin merupakan agenda serius yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia, yang perlu ditanggulagi diantaranya pada wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Maret 2023 mencapai 153,25 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 150 jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 153,40 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami penurunan dari 12,21 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 12,18 persen pada bulan Maret 2023.

Kematian merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa ditebak kapan datangnya. Kematian dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan maupun sesuatu yang wajar di dalam kehidupan. Kematian bisa meninggalkan duka bagi keluarga dan saudara dan juga dapat berpotensi meninggalkan risiko karena adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan (Kompas, 2023; Kurniasih & Thohir, 2022). Beban biaya yang ditanggung oleh keluarganya antara lain biaya pemakaman, biaya rumah sakit, dan lain sebagainya yang tidak sedikit

jumlahnya (Aslan & ada, 2020; Kompas, 2023; Sukarsa, 2020).

Beban biaya kematian selain menjadi tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat sekitarnya, oleh karenanya diperlukan adanya peran serta pemerintah dalam menanggulangi masalah beban biaya kematian tersebut dengan memberikan biaya santunan, sehingga beban hidup keluarga dan masyarakat menjadi lebih ringan (Fauziah et al., 2022; Permana, 2020).

Mengenai beban biaya kematian, maka pemerintah daerah sudah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengatasi masalah terkait jaminan kematian (Fauziah et al., 2022; Sinamo et al., 2023). Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam memajukan daerahnya yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam yang dimiliki sebagai sarana strategis dalam mensejahterakan rakyat di daerahnya.

Berdasarkan data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, upaya mensejahterakan rakyat daerah tidak seharusnya hanya terpaku pada bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah, tetapi juga bagaimana daerah mampu menghadapi kesenjangan sosial (Kompas, 2023; Permana, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat program-program yang dapat mengeluarkan masyarakat daerah dari persoalan-persoalan kemiskinan.

Terdapat warga miskin yang menghadapi kesulitan ketika hendak mengurus segala hal berkaitan dengan prosesi pemakaman anggota keluarganya, juga sering kali terkendala oleh keterbatasan dana yang dimiliki (Kompas, 2023; Sukarsa, 2020). Hal inilah yang menjadi pemicu bagi pemerintah daerah

untuk berinisiatif memberikan subsidi santunan kepada masyarakat miskin/kurang mampu di daerahnya dengan mengalokasikan dana santunan itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Permana, 2020; Sinamo et al., 2023). Program santunan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya distribusi pendapatan dengan didasari oleh nilai keadilan sosial dalam pembangunan. Program santunan merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah dalam mengakomodasi harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh dan juga sangat rendah, dikarenakan salah satu persyaratannya yaitu dengan surat keterangan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas atau menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Dalam pembuatan SKTM ini sangat mudah didapatkan di Kelurahan, sehingga masih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum biro jasa yang dapat mengambil keuntungan, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Bantuan Santunan Kematian oleh orang-orang yang bisa dianggap mampu dalam perekonomiannya.

TINJAUAN TEORETIS

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik, kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Midgley, 2000; Noya, 2025). Kebijakan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko, kerentanan, dan kesesahan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan ((FES), 2024; UNICEF, 2012). Karakter atau nuansa

publik dalam definisi ini menunjukkan pada tindakan kolektif, yakni menghimpun dan mengelola sumber daya berdasarkan prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun kombinasi dari kedua sektor tersebut (Pratama, 2024; Suharto, 2009).

Kebijakan publik mempunyai elemen penting dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensional, yaitu berupa perlindungan sosial (Barrientos, 2013; Midgley, 2014). Perlindungan sosial merupakan model kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai pelayanan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai macam risiko (Conway et al., 2019; Devereux & Sabates-Wheeler, 2004).

Tiga tujuan utama perlindungan sosial menurut (Suharto, 2009) adalah untuk: mencegah dan mengurangi risiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi; serta memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi.

Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi atau penilaian kebijakan berkaitan kembali terhadap implementasi kebijakan tetapi pada tahap ini berfokus pada hasil dan juga akibat dari implementasi kebijakan. Dalam hal ini evaluasi kebijakan menjadi penentuan keputusan mengenai apakah kebijakan ini perlu dihentikan atau diteruskan. (Nugroho, 2009) menerangkan bahwa kebijakan publik harus diawasi dan diantara mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi kebijakan. (Rivai & Mulyadi, 2012) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ada tiga yaitu sebelum

dilaksanakan pada waktu dilaksanakan dan setelah dilaksanakan.

Menurut Dunn (2000) evaluasi memiliki fungsi penting antara lain yaitu:

- 1) Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- 2) Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan dan target dalam kebijakan publik.
- 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah.

(Dunn, 2000) juga menjelaskan terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak, yaitu:

- 1) Efektivitas
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semangkin besar, maka semangkin besar pula efektivitasnya.
- 2) Efisiensi
Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- 3) Kecukupan
Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi

seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

- 4) Pemerataan
Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
- 5) Responsivitas
Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/penolakan.
- 6) Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya adalah ketidak mampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu daerah. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Menurut Chambers dalam (Nasikun, 2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: Pertama, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup

untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Ketiga, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Keempat, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro No. 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah yang memiliki kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Dapat disimpulkan menurut para ahli dan Perbup di atas, kemiskinan merupakan masalah sosial. Kemiskinan tersebut didasari pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan salah satunya yaitu permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi karena manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil mata pencaharian seperti pertanian yang akan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan.

Program Santunan Penduduk Miskin

Program menurut (Winarno. 2012) merupakan rencana yang bersifat

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Program santunan duka untuk penduduk miskin, sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. Maksud dan tujuan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 47 Tahun 2021 tersebut adalah:

1. Maksud diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin di Daerah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
2. Tujuan diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin di Daerah adalah:
 - a. Meringankan beban masyarakat miskin bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan masalah-masalah sosial dalam hal ini adalah masalah pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, maka peneliti mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud mendiskripsikan dan menganalisis tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan program santunan duka bagi masyarakat miskin di

Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan dimensi (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) pemerataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles & Huberman, 1992) dalam Fuad dan Nugroho (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah (Data Collection)

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan dengan menggunakan alat-alat bantu yang dibutuhkan seperti handphone dan alat tulis untuk mencatat data yang ada.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci serta di kategorisasikan agar mudah disajikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Reduksi data juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami dan data tersebut biasanya akan disajikan baik dalam bentuk narasi, bagan, grafik, hubungan antar variabel, dan sejenisnya.

4. Verifikasi dan Penyimpulan Akhir (Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah menjadi absah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semangkin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pada evaluasi pelaksanaan kebijakan program santunan kematian bagi penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro yang pelaksanaannya tentu pemerintah setempat memiliki peran penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau penduduk miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa, program santunan duka yang berjalan sejak tahun 2018, sudah disosialisasikan dengan baik. Pemerintah Kelurahan Ledok Wetan juga melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung keluarga yang sedang berduka dan memberikan santunan duka untuk membantu proses pemakaman dan biaya lainnya yang terkait. Program ini dianggap efektif dalam membantu keluarga yang berduka.

Efisiensi

Efisiensi kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang dirancang dan diterapkan untuk memaksimalkan hasil

yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dalam program santunan duka bagi penduduk miskin di kabupaten Bojonegoro khususnya di Kelurahan Ledok Wetan terdapat faktor yang mempengaruhi efisiensi. Salah satu faktor yang penting adanya sosialisasi kepada penduduk miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa, seluruh warga khususnya warga miskin telah menerima informasi program santunan duka. Jadi penyampaian informasi santunan duka sudah efisien.

Kecukupan

Kecukupan merupakan suatu bentuk yang memiliki kaitan erat dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, nilai ataupun kesempatan. Dalam hal ini, tentu memiliki hubungan dalam mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa, program santunan duka dapat meringankan beban biaya pada keluarga yang sedang tertimpa musibah. Santunan Kematian yang diterima ahli waris saat ini sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakaman dan biaya pasca ditinggalkan keluarga yang meninggal dunia.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa, informasi program santunan duka

dan pemberian santunan duka kepada ahli waris di Kelurahan Ledok Wetan sudah merata secara adil kepada kelompok sasaran yakni masyarakat atau penduduk miskin.

Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/penolakan. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat responsivitas masyarakat terhadap kebijakan program santunan kematian bagi penduduk miskin/ekonomi menengah kebawah memiliki apresiasi yang sangat tinggi. Kepedulian sesama terbangun, hal ini dapat dilihat dengan adanya gotong royong antar warga. Jenazah di bawa ke pemakaman dengan cara ditandu atau di dorong menggunakan kereta dorong.

Ketepatan

Penerapan program santunan kematian adalah suatu bentuk dukungan atau bantuan finansial yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris seseorang yang telah meninggal. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban finansial yang timbul akibat kematian anggota keluarga atau pencari nafkah utama.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa santunan duka ditujukan untuk masyarakat miskin Kabupaten

Bojonegoro, dan mereka yang berstatus sebagai PNS atau dianggap mampu tidak berhak mengajukan. Proses permohonan santunan duka, pemerintah meluncurkan aplikasi SANDUK untuk mempermudah administrasi. Pengajuan tidak lagi dilakukan langsung ke kabupaten tetapi melalui kecamatan menggunakan aplikasi SANDUK. Ini mengurangi beban administratif pada masyarakat dan mempercepat proses pengajuan.

Pembahasan

Program santunan duka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin yang ditinggal oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan memberikan bantuan finansial untuk membantu proses pemakaman dan biaya lainnya yang terkait. Program ini dianggap efektif dalam membantu keluarga yang berduka.

Dalam Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Bojonegoro terdapat faktor yang mempengaruhi efisiensi. Salah satu faktor yang penting adalah terjalannya sosialisasi kepada penduduk miskin. Mengenai sosialisasi program santunan kematian telah dilaksanakan di 28 kecamatan yang hanya mengundang para stakeholder seperti Staf Kecamatan, Staf kelurahan, RT/RW dan juga amil.

Bantuan santunan dapat dikategorikan relative cukup. Ketika masyarakat yang meninggal tentu pihak keluarga memberikan upah untuk para pekerja gali kubur, jika santunan tidak diberikan maka pihak keluarga akan mengeluarkan uang pribadi, akan tetapi jika santunan tersebut diberikan bantuan, maka akan sangat membantu bagi pihak keluarga dalam meringankan beban biaya tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui santunan kematian merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin.

Pemerataan pada kebijakan publik merupakan sebuah implementasi keadilan. Pemerataan yang tepat sasaran memberikan sebuah kriteria terhadap kesamaan antar masyarakat. Hal ini memberikan kesetaraan terhadap semua kelompok sosial dalam hidup bermasyarakat. Pada pelaksanaan kebijakan program santunan kematian bagi penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro dikategorikan sudah merata dan adil secara menyeluruh kepada yang berhak menerima, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Seperti yang diungkapkan Dunn (2000) bahwa pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

Kebijakan santunan duka yang responsif harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Prosedur pengajuannya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Informasi mengenai persyaratan, cara pengajuan, dan mekanisme pencairan harus mudah ditemukan dan dipahami. Waktu pencairan santunan duka harus cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini penting untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu ketepatan dimana secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada tujuan kebijakan tersebut. Ketepatan pada program santunan kematian mengacu pada apakah tujuan atau nilai dapat mengakomodir fakta santunan kematian di lapangan. Pada program santunan sendiri, ketepatan sangatlah berguna bagi para penduduk miskin tepat sasaran. Santunan kematian ditujukan untuk masyarakat miskin Kabupaten Bojonegoro, dan mereka yang berstatus sebagai PNS atau dianggap mampu tidak berhak mengajukan. Mayoritas penerima santunan adalah masyarakat miskin yang memenuhi kriteria.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pemberian santunan duka bagi penduduk miskin di Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa program bantuan santunan duka yang dilaksanakan sudah dapat memberikan manfaat bagi penduduk miskin.

Dalam aspek efektivitas program ini telah berfungsi dengan baik dalam menyediakan dukungan yang diperlukan, sehingga bisa meringankan kesulitan keluarga yang ditinggalkan.

Dalam aspek efisiensi adalah terjalannya sosialisasi kepada penduduk miskin. Sosialisasi telah dilaksanakan di 28 kecamatan yang hanya mengundang para stakeholder seperti Staf Kecamatan, Staf kelurahan, RT/RW dan juga amil.

Dalam aspek kecukupan bantuan santunan dapat dikategorikan relative cukup.

Dalam aspek pemerataan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan dana yang cukup untuk program santunan duka, memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam aspek responsivitas, kebijakan santunan duka mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Prosedur pengajuannya sederhana dan tidak berbelit-belit.

Dalam aspek ketepatan Santunan kematian ditujukan untuk masyarakat miskin Kabupaten Bojonegoro, dan mereka yang berstatus sebagai PNS atau dianggap mampu tidak berhak mengajukan.

DAFTAR PUSTAKA

(FES), F. E. S. (2024). *Strengthening Social Protection Systems in Indonesia*. FES Indonesia.

Aslan, A., & ada], [Tambahkan nama penulis lain jika. (2020). *Funeral Poverty: An Exploratory Study for Micro-Takaful*. Universiti Sains Islam

Malaysia.

Barrientos, A. (2013). *Social Assistance in Developing Countries*. Cambridge University Press.

Conway, T., de Haan, A., & Norton, A. (2019). Social Protection: New Directions of Donor Agencies. *Journal of International Development*, 31(4), 289–308.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative Social Protection. *IDS Working Paper*, 232, 1–36.

Dunn, W. N. (2000). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Prentice Hall.

Fauziah, P., Tuah, N., & Mulyadi, A. (2022). Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/33950>

Kompas. (2023). *Ikhtiar warga Ibu Kota menopang biaya kematian*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/06/10/ikhtiar-warga-ibu-kota-menopang-biaya-kematian>

Kurniasih, D., & Thohir, A. (2022). Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung. *Jurnal Ranah Publik Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/371454944_Evaluasi_Kebijakan_Peraturan_Daerah_Kota_Bandung_Nomor_3_Tahu_2017_tentang_Retribusi_Pelayanan_Pemakaman_di_Kota_Bandung

Midgley, J. (2000). Social Policy for the Twenty-First Century. *Social Development Issues*, 22(1), 5–19.

Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. SAGE Publications.

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data kualitatif (Terjemahan Teecep Rohendi*. UI Press.

Nasikun. (2001). *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Diktat Kuliah Program Magister Administrasi*

- Publik. Universitas Gadjah Mada Press.
- Noya, D. (2025). Social policy and welfare in contemporary Indonesia. *Journal of Southeast Asian Social Policy*, 12(2), 45–60.
- Nugroho, T. (2009). *Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan*. <http://triyononugroho.blogspot.com/2009/03/pengaruh-kompensasi-dankepimpinan.html>
- Permana, K. W. A. (2020). Kontribusi dari retribusi izin pelayanan pemakaman terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2015–2019. *Jurnal Interprof*, 6(2). <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/interprof/article/view/1153>
- Pratama, A. (2024). Gotong Royong as a Foundation for Indonesian Social Policy. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 15(1), 12–27.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sinamo, R., Putro, S. S., & Sukarno, D. (2023). Implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di Kota Cimahi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/28708>
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Sukarsa. (2020). *Subsidi silang praktik pengabeanan berbasis manajemen upacara di Desa Penyaringan, Kabupaten Jembrana*. https://www.researchgate.net/publication/374442161_Subsidi_Silang_Praktik_Pengabeanan_Berbasis_Manajemen_Upacara_di_Desa_Penyaringan_Kabupaten_Jembrana
- UNICEF. (2012). *Social Protection Strategic Framework*. UNICEF.